

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

#### **5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

##### **5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

###### **1. DINAS PENDIDIKAN**

- a. Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak
- b. Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)
- c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Program Non Formal

###### **2. DINAS KESEHATAN**

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- e. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
- f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- g. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

###### **3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan
- d. Program Pengendalian Banjir
- e. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya

- f. Program Sarana Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- g. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan
- h. Program Peningkatan Kualitas dan Penataan Kawasan Daerah sesuai Rencana Tata Ruang
- i. Program Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Prasarana Pemerintahan
- j. Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Pelayanan Jasa Konstruksi serta Verifikasi Perijinan

#### **4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- a. Program Pengembangan Kinerja Air Limbah
- b. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
- c. Program Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman
- d. Program sertifikasi perumahan dan permukiman
- e. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan
- f. Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum
- g. Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum
- h. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

#### **5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

- a. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan
- d. Program Perencanaan Ekonomi
- e. Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA
- f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
- g. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- h. Program Penelitian dan pengembangan Daerah
- i. Program Perencanaan Sosial Budaya Urusan Statistik
- j. Program Pengembangan data dan Informasi

**6. DINAS PERHUBUNGAN**

- a. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
- f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

**7. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan e-government
- b. Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Sektor
- c. Program Persandian dan Pengamanan Informasi

**8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

**9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

**10. DINAS SOSIAL**

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Penanganan Fakir Miskin
- c. Program Rehabilitasi Sosial
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

**11. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

**12. DINAS TENAGA KERJA**

- a. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- b. Program Peningkatan kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- d. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

**13. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
- c. Program Peningkatan Daya Saing Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Urusan Perindustrian

- d. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Urusan Perdagangan

- e. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- f. Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

**14. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Urusan Kebudayaan

- a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Urusan Pariwisata



- c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- d. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- e. Program pengembangan usaha dan industri pariwisata
- f. Program Pengembangan Kemitraan

**15. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

- a. Program Peningkatan peran serta Kepemudaan
- b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga

**16. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
- b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- c. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

**17. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- c. Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan masyarakat

**18. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Program Penanggulangan Bencana
- b. Program Mitigasi Bencana

**19. SEKRETARIAT DAERAH**

- a. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- b. Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan

- c. Program Penataan. Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- d. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
- e. Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan
- f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- g. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
- h. Program Pembinaan BUMD
- i. Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah
- j. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- k. Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan
- l. Program Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
- m. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan keprotokolan  
Urusan Pertanahan
- n. Program Penataan. Penguasaan. Pemilikan. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- o. Program Pembinaan Pertanahan

## **20. SEKRETARIAT DPRD**

- a. Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

## **21. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
- b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Program Manajemen Aset Daerah

## **22. BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- a. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

**23. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

- a. Program Pendidikan Kedinasan
- b. Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah

**24. INSPEKTORAT DAERAH**

- a. Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah
- b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
- c. Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal

**25. KECAMATAN**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
- g. Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
- h. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan

**26. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Urusan Pangan

- a. Program Peningkatan Ketahanan pangan

Urusan Pertanian

- b. Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
- c. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan

- d. Program Peningkatan Produksi. Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan
- e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- f. Program Pemenuhan keamanan pangan Asal ternak dan Agribisnis peternakan rakyat
- g. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

**27. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- a. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- c. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- d. Program Perlindungan Anak

**28. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
- b. Pengembangan Lembaga ekonomi desa
- c. Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- d. Program pembinaan dan fasilitasi Keuangan desa

**29. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

- a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- b. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- c. Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
- d. Program Pengembangan Perpustakaan
- e. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

**30. DINAS PERIKANAN**

- a. Program pengembangan budidaya perikanan
- b. Program pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan
- c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap



d. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

## 5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Setelah melalui proses penyusunan dan perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan baik melalui mekanisme bottom-up, top-down, serta partisipatif maka rencana program dan kegiatan prioritas daerah untuk tahun 2020 akan disajikan pada tabel-tabel di dalam bab berikut ini. Adapun rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan urusan dan satuan kerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2020**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / OPD	INDIKASI ANGGARAN ( Rp )
1	2	3
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>410,251,147,000</b>
<b>1 . 01</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>89.557.800.000</b>
1 . 01 . 1	Dinas Pendidikan	89.557.800.000
<b>1 . 02</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>105.076.800.000</b>
1 . 02 . 1	Dinas Kesehatan	105.076.800.000
<b>1 . 03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>105.345.000.000</b>
1 . 03 . 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	105.345.000.000
<b>1 . 04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>94.983.400.000</b>
1 . 04 . 1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	94.983.400.000
<b>1 . 05</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>9,232,147,000</b>
1 . 05 . 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.863.200.000
1 . 05 . 2	Satuan Polisi Pamong Praja	4.276.947.000
1 . 05 . 3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.092.000.000
<b>1 . 06</b>	<b>Sosial</b>	<b>6.056.000.000</b>
1 . 06 . 1	Dinas Sosial	6.056.000.000
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>56,587,202,000</b>
<b>2 . 02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>5.666.000.000</b>
2 . 02 . 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.666.000.000
<b>2 . 03</b>	<b>Pertanian</b>	<b>5.732.200.000</b>
2 . 03 . 1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.732.200.000
<b>2 . 05</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>3.318.400.000</b>
2 . 05 . 1	Dinas Lingkungan Hidup	3.318.400.000
<b>2 . 06</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>2.993.200.000</b>
2 . 06 . 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.993.200.000
<b>2 . 07</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>3.086.000.000</b>
2 . 07 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.086.000.000



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / OPD	INDIKASI ANGGARAN ( Rp )
1	2	3
<b>2 . 09</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>7.494.800.000</b>
2 . 09 . 1	Dinas Perhubungan	7.494.800.000
<b>2 . 10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>9.608.000.000</b>
2 . 10 . 1	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.608.000.000
<b>2 . 11</b>	<b>Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>3.660.200.000</b>
2 . 11 . 1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	3.660.200.000
<b>2 . 12</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>4.246.800.000</b>
2 . 12 . 1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.246.800.000
<b>2 . 13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>5.731.000.000</b>
2 . 13 . 1	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.731.000.000
<b>2 . 14</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>2.475.200.000</b>
2 . 14 . 1	Dinas Tenaga Kerja	2.475.200.000
<b>2 . 18</b>	<b>Kearsipan</b>	<b>2.575.402.000</b>
2 . 18 . 1	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.575.402.000
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>	<b>24,555,400,000</b>
<b>3 . 01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>12.351.600.000</b>
3 . 01 . 01	Dinas Perikanan	12.351.600.000
<b>3 . 02</b>	<b>Pariwisata dan Kebudayaan</b>	<b>12.203.800.000</b>
3 . 02 . 1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.203.800.000
<b>4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>158,191,273,100</b>
<b>4 . 01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>	<b>107,884,101,300</b>
4 . 01 . 1	Sekretariat DPRD	20.180.651.000
4 . 01 . 2	Sekretariat Daerah	45.313.843.000
4 . 01 . 3	Kecamatan Bintan Timur	8.962.964.000
4 . 01 . 4	Kecamatan Gunung Kijang	4.663.703.000
4 . 01 . 5	Kecamatan Teluk Bintan	3.010.858.200
4 . 01 . 6	Kecamatan Bintan Utara	7.562.710.400
4 . 01 . 7	Kecamatan Teluk Sebong	3.362.928.300
4 . 01 . 8	Kecamatan Tambelan	3.061.648.400
4 . 01 . 9	Kecamatan Seri Kuala Lobam	4.528.480.000
4 . 01 . 10	Kecamatan Toapaya	3.703.515.000
4 . 01 . 11	Kecamatan Bintan Pesisir	1.682.400.000
4 . 01 . 12	Kecamatan Mantang	1.850.400.000
<b>4 . 02</b>	<b>Pengawasan</b>	<b>3.718.000.000</b>
4 . 02 . 1	Inspektorat Daerah	3.718.000.000
<b>4 . 03</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>14.606.371.800</b>
4 . 03 . 01	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.606.371.800
<b>4 . 04</b>	<b>Keuangan</b>	<b>27,525,600,000</b>
4 . 04 . 1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.736.400.000
4 . 04 . 2	Badan Pendapatan Daerah	5.789.200.000
<b>4 . 05</b>	<b>Kepegawaian</b>	<b>4.457.200.000</b>
4 . 05 . 1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.457.200.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>649.585.022.100</b>

Selanjutnya, rincian rencana program, kegiatan, sasaran serta anggaran belanja langsung tahun 2020 berdasarkan urusan kewenangan dan organisasi perangkat daerah sebagaimana terlampir :

**REKAPITULASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2020**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD )	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2020	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	45.313.843.000	
2	Sekretariat DPRD	20.180.651.000	
3	Inspektorat Daerah	3.718.000.000	
4	Dinas Pendidikan	89.557.800.000	
5	Dinas Kesehatan	105.076.800.000	
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.993.200.000	
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.666.000.000	
8	Satuan Polisi Pamong Praja	4.276.947.000	
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	3.660.200.000	
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.203.800.000	
11	Dinas Perikanan	12.351.600.000	
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.318.400.000	
13	Dinas Tenaga Kerja	2.475.200.000	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.246.800.000	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.608.000.000	
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.731.000.000	
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.086.000.000	
18	Dinas Sosial	6.056.000.000	
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	105.345.000.000	
20	Dinas Perhubungan	7.494.800.000	
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.732.200.000	
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip		



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD )	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2020	KETERANGAN
1	2	3	4
		2.575.402.000	
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	94.983.400.000	
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.606.371.800	
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.457.200.000	
26	Badan Pendapatan Daerah	5.789.200.000	
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.736.400.000	
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.863.200.000	
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.092.000.000	
30	Kecamatan Bintan Timur	8.962.964.000	
31	Kecamatan Gunung Kijang	4.663.703.000	
32	Kecamatan Teluk Bintan	3.010.858.200	
33	Kecamatan Bintan Utara	7.562.710.400	
34	Kecamatan Teluk Sebong	3.362.928.300	
35	Kecamatan Tambelan	3.061.648.400	
36	Kecamatan Seri Kuala Lobam	4.528.480.000	
37	Kecamatan Toapaya	3.703.515.000	
38	Kecamatan Bintan Pesisir	1.682.400.000	
39	Kecamatan Mantang	1.850.400.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>649.585.022.100</b>	